

**PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN  
PERSANDIAN DALAM PENINGKATAN INDEKS MASYARAKAT DIGITAL  
(STUDI DI DISKOMINFOTIKSAN KABUPATEN PESAWARAN)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**IFTINAN RUSDATUL JIHAN  
NPM 2116021081**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN  
PERSANDIAN DALAM PENINGKATAN INDEKS MASYARAKAT DIGITAL  
(STUDI DI DISKOMINFOTIKSAN KABUPATEN PESAWARAN)**

**Oleh**

**IFTINAN RUSDATUL JIHAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai  
GELAR SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2025**

## **ABSTRAK**

### **PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN DALAM PENINGKATAN INDEKS MASYARAKAT DIGITAL (STUDI DI DISKOMINFOTIKSAN KABUPATEN PESAWARAN)**

**Oleh:**

**IFTINAN RUSDATUL JIHAN**

Transformasi digital menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional terutama dalam menghadapi era digital yang semakin cepat. Pemerintah mendorong percepatan transformasi digital dengan membuat sebuah pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan digital di seluruh daerah di Indonesia. Namun, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi infrastruktur, keterampilan maupun pemberdayaan yang menjadi penghambat bagi hasil pengukuran tersebut. Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting dalam upaya peningkatan indeks masyarakat digital Indonesia (IMDI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam mewujudkan pemerintah digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Labolo (2006) untuk menganalisa empat pilar IMDI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran berhasil meningkatkan IMDI melalui peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Namun, masih membutuhkan penguatan regulasi mengenai pengembangan infrastruktur digital terutama di daerah *blankspot* untuk mewujudkan masyarakat digital yang inklusif di Kabupaten Pesawaran.

**Kata Kunci: Peran Pemerintah, Masyarakat Digital**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF COMMUNICATIONS INFORMATICS STATISTICS AND CODING SERVICE IN INCREASING THE DIGITAL SOCIETY INDEX (A CASE STUDY OF DISKOMINFOTIKSAN PESAWARAN REGENCY)**

**By:**

**IFTINAN RUSDATUL JIHAN**

Digital transformation has become one of the main priorities in national development, especially in facing the rapidly advancing digital era. The government is accelerating digital transformation by measuring the level of digital competence and skills across all regions in Indonesia. However, there are still gaps in infrastructure, skills, and empowerment that hinder this measurement. Therefore, the role of local governments is crucial in efforts to improve the Indonesia Digital Society Index. This study aims to identify and describe the role of the Department of Communication, Informatics, Statistics, and Encryption in realizing digital government. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study include interviews and documentation. The study applies the role theory proposed by Labolo (2006) to analyze the four pillars of Indonesia Digital Society Index. The results show that the Department of Communication, Informatics, Statistics, and Encryption of Pesawaran Regency has succeeded in increasing Indonesia Digital Society Index through its roles as a regulator, dynamizer, and facilitator. However, there is still a need to strengthen regulations related to the development of digital infrastructure, especially in blank spot area, in order to realize an inclusive digital society in Pesawaran Regency.

**Keywords: Role of Government, Digital Society**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul Skripsi : **PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
STATISTIK DAN PERSANDIAN DALAM  
PENINGKATAN INDEKS MASYARAKAT  
DIGITAL (STUDI DI DISKOMINFOTIKSAN  
KABUPATEN PESAWARAN**

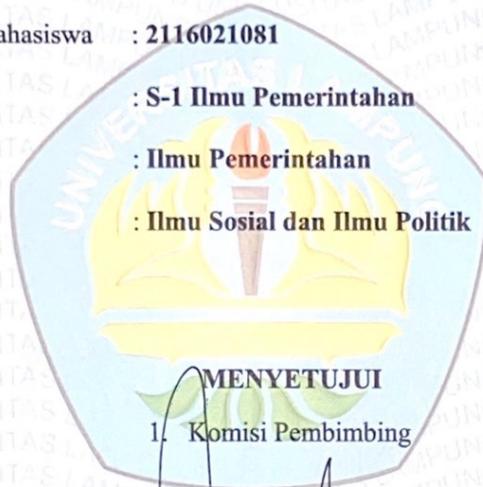
Nama Mahasiswa : **Iffinan Rusdatul Jihan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021081**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

**Prof. Arizka Warganegara, S.IP, M.A., Ph.D**

**NIP. 198106202006041003**

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Tabah Maryanah**

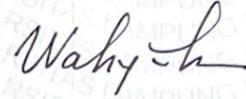
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

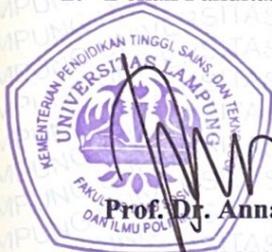
**Ketua : Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D**



**Penguji Utama : Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**

**NIP. 1976082120 0003 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 2 Juni 2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Iftinan Rusdatul Jihan  
NPM 2116021081

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Iftinan Rusdatul Jihan lahir di Metro, 18 Januari 2002, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Rohmat dan Ibu Anna Sundari. Penulis memiliki satu kakak perempuan bernama Nadya Rohmatul Lailia.

Penulis memulai jenjang pendidikan formal dari bangku sekolah dasar di SDN 6 Metro Barat tahun 2008 – 2014. Jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 2 Metro dari tahun 2014 – 2017. Kemudian, sekolah menengah atas di SMAN 3 Metro dari tahun 2017- 2020.

Pasca lulus pada bangku menengah atas di tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2021. Penulis melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) menjadi mahasiswa S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa ilmu serta pengetahuan tidak hanya didapatkan melalui proses perkuliahan saja. Maka, penulis mengikuti beberapa kegiatan aktif di beberapa organisasi baik dari dalam kampus maupun luar kampus seperti organisasi FSPI pada tahun 2021. Penulis bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan sebagai anggota Bidang Informasi dan Komunikasi pada tahun 2023.

Penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2024 selama kurang lebih 40 hari yang bertempat di Desa Tanjung Serayan, Kecamatan

Mesuji, Kabupaten Mesuji. Selain itu, Penulis juga mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 6 di Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran.

## **MOTTO**

*“Boring’ can be a lot of fun. Especially if it’s on your own terms”*

**(Hugh Jackman)**

*“Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life”*

**(Mark Twain)**

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

**(QS. Al-Insyirah: 5)**

*“It will pass”*

**(Iftinan Rusdatul Jihan)**

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,  
Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi  
ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

dan

Dengan kerendahan hati dan ketulusan persembahkan karya sederhana ini  
kepada orang tua ku Bapak dan Ibu

**Rohmat dan Anna Sundari**

Serta kakak satu-satunya

**Nadya Rohmatul Lailia**

Terima kasih untuk segala doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini,  
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

**Almamaterku Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN DALAM PENINGKATAN INDEKS MASYARAKAT DIGITAL (STUDI DI DISKOMINFOTIKSAN KABUPATEN PESAWARAN)”**. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besara Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pimpinan kaumnya.

Suatu hal yang menggembirakan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afraini, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan serta motivasi-motivasi yang telah diberikan serta kemudahan yang telah diberikan selama proses bimbingan dan pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si., selaku dosen penguji, terima kasih ibu atas kritik, saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P., selaku dosen pembimbing akademik penulis, terima kasih bapak atas segala saran, dukungan selama perkuliahan;
7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak dan ibu semua. Terima kasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terima kasih atas segala yang engkau berikan;
8. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Rohmat dan Ibu Anna Sundari yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi dengan baik. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, kasih sayang, dan perjuangan. Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan mendapat berkah dari Allah SWT dan selalu dilimpahi kesehatan serta kebahagiaan;

9. Terima kasih kepada kakak penulis satu-satunya, Nadya Rohmatul Lailia yang selalu mendukung dan memotivasi serta menghibur penulis selama menjalani perkuliahan dan pengerjaan skripsi;
10. Terima kasih kepada informan penulis, berkat pendapat dan jawaban kalian skripsi ini dapat diselesaikan;
11. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 kelas regular A, B, dan M. Terima kasih karena telah menjadi teman dan memberi dukungan terhadap penulis;
12. Terimakasih kepada om dan tante penulis, Om Ikhwan dan Tante Diah yang telah memberikan dukungan dan doa selama masa perkuliahan terutama pada saat pengerjaan skripsi kepada penulis;
13. Terima kasih kepada saudara-saudara penulis, Destianti Sekar Sari, Andhita Adelia Putri, Zahra Wulan Ramadhani, Rizka Ramdhani Putri, M. Sampoerna Abdi, Milla Khoirunnisa dan M. Azzom Ahdan Alhamdi yang telah memberikan dukungan dan menyemangati penulis;
14. Teman-teman SMA grup “Diyot”, Berlyana Amanda, Nazhifa Husna Hanifah, Bunga Putri Ananda, Nabila, dan Nova Ariandini. Terima kasih sudah menemani penulis semasa SMA hingga sekarang. Tidak lupa pula Shafira Irnadya Putri dan Fidelma Azzahra Pinkan Zondia yang sudah membantu dan memotivasi penulis;
15. Terima kasih kepada teman-teman selama masa perkuliahan grup “BOWLEHHH”, Lita Evayanti, Shoffi Silva Salsabila, Farhan Al Hafaf, Dinda Fitri Khairunisa, Anida Gusti Agilia, Anggun Zairatul Arifa, Adelia Firanti, dan Elia Rosa. Terima kasih sudah menemani penulis semasa perkuliahan. Tidak lupa pula Astri Kemala Sari dan Rosa Apriliani yang sudah bersama membantu dan menyemangati penulis selama proses pembuatan skripsi;
16. Terima kasih kepada teman-teman KKN Desa Tanjung Serayan, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji yang telah bersedia bekerjasama dalam

menjalankan program selama melaksanakan program KKN sehingga dapat menyelesaikan program KKN dengan baik dan memuaskan;

17. Terima kasih kepada teman-teman Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 6 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam menjalankan program magang dan proses pembuatan skripsi;
18. Terakhir, terima kasih untuk seluruh staf Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran atas segala bimbingan, ilmu, serta bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan program magang MBKM dengan baik;

Akhir kata, penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Aamiin ya Rabbal Alamin.

Bandar Lampung, 2 Juni 2025

Penulis

**Iftinan Rusdatul Jihan**

NPM. 2116021081

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Tinjauan Peran.....	9
2.1.1. Peran Sebagai Regulator.....	10
2.1.2. Peran Sebagai Dinamisator.....	12
2.1.3. Peran Sebagai Fasilitator .....	13
2.2. Kerangka Pikir.....	15
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>17</b>
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	17

3.2. Fokus Penelitian .....	18
3.3. Lokasi Penelitian .....	19
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	19
3.5. Teknik Pengolahan Data.....	23
3.6. Teknik Analisis Data .....	24
3.7. Teknik Validasi Data .....	26
<b>IV. GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>28</b>
4.1. Sejarah Kabupaten Pesawaran.....	28
4.2. Gambaran Umum Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran.....	30
4.2.1. Kepala Dinas .....	33
4.2.2. Sekretariat.....	34
4.2.3. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	35
4.2.4. Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Akses Informasi .....	36
4.2.5. Bidang Infrastruktur Telematika dan Persandian .....	37
4.2.6. Bidang Informasi dan Statistik .....	38
4.3. Visi Misi dan Moto Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran.....	39
4.3.1. Visi .....	39
4.3.2. Misi.....	39
4.3.3.Motto .....	40
4.4. Peran Ideal Dinas Dalam Peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia .....	40
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
5.1. Hasil Penelitian.....	42
5.1.1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia .....	42
5.1.2. Peran Pemerintah Pilar Indeks Masyarakat Digital Indonesia .....	46
5.1.2.1. Peran Sebagai Regulator .....	46

5.1.2.2. Peran Sebagai Dinamisator .....	48
5.1.2.3. Peran Sebagai Fasilitator.....	55
5.2. Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
5.2.1. Peran Sebagai Regulator.....	68
5.2.2. Peran Sebagai Dinamisator.....	75
5.2.3. Peran Sebagai Fasilitator .....	80
5.3. Tantangan Dalam Peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia .....	87
5.3. Rekomendasi Kebijakan .....	89
<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
6.1. Simpulan.....	92
6.2. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Skor Pengukuran IMDI Provinsi Lampung .....	3
2. Matrik Teori Peran Pemerintah Sebagai Regulator.....	12
3. Matrik Teori Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator.....	13
4. Matrik Teori Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator .....	15
5. Informan Penelitian.....	21
6. Dokumen Penelitian .....	22
7. Matrik Teori Peran Pemerintah sebagai Regulator .....	46
8. Matrik Teori Peran Pemerintah sebagai Dinamisator .....	54
9. Matrik Teori Peran Pemerintah sebagai Fasilitator.....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kategori Skor IMDI .....	2
2. Kerangka Pikir.....	16
3. Teknik Analisis Data.....	25
4. Triangulasi Sumber .....	26
5. Batas Administrasi Kabupaten Pesawaran.....	29
6. Struktur Organisasi.....	33
7. Kegiatan Pembinaan KIM Kabupaten Pesawaran .....	52
8. Pembinaan Desa Cantik .....	53
9. Program MSIB Diskominfo.....	63
10. Internet Service Provider.....	65
11. SMESCO.....	58
12. Digitalent.....	59

## DAFTAR SINGKATAN

AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
BPS	: Badan Pusat Statistik
BTS	: <i>Base Transceiver Station</i>
CAPI	: <i>Computer Assited Personel Interviewing</i>
IMDI	: Indeks Masyarakat Digital Indonesia
ISP	: <i>Internet Service Provider</i>
KIM	: Kelompok Informasi Masyarakat
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PCA	: <i>Principal Component Analysis</i>
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMESCO	: <i>Small and Medium Enterprises and Cooperative</i>
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
TI	: Teknologi Informasi
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>

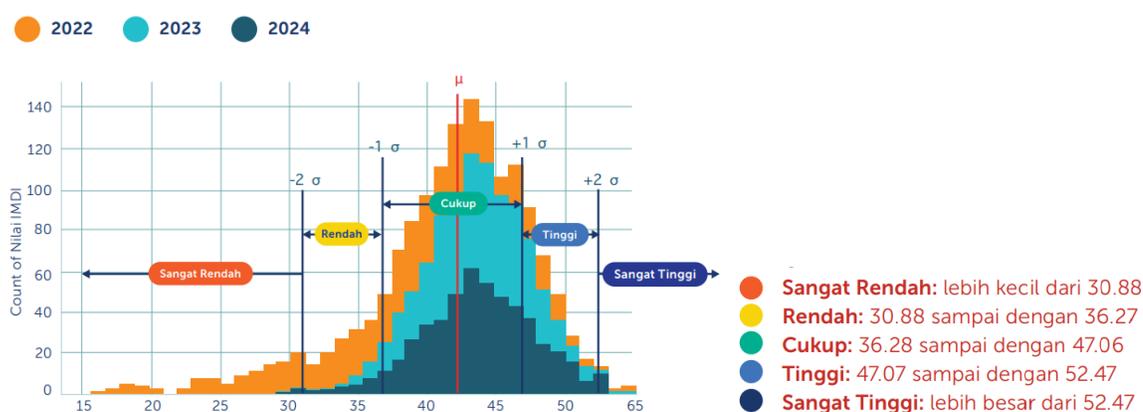
# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Upaya pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital adalah dengan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023. Salah satu upaya percepatan transformasi digital adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) membuat sebuah pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital yang disebut dengan indeks masyarakat digital Indonesia (IMDI). Pengukuran IMDI dilatarbelakangi oleh laporan *World Bank* tahun 2015 hingga 2030. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan sembilan juta tenaga semi terampil dan terampil pada sektor digital, atau membutuhkan 600 ribu orang/hari (Kominfo RI, 2024).

Selanjutnya, Kemenkominfo RI melakukan pemetaan kondisi masyarakat pada upaya pengukuran IMDI berdasarkan empat pilar, yaitu pilar infrastruktur dan ekosistem, pilar keterampilan digital, pilar pemberdayaan, dan pilar pekerjaan. Tujuan pemetaan empat pilar tersebut adalah untuk mengetahui tingkat capaian IMDI pada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Empat pilar tersebut sebagai landasan dalam penerapan fokus target peningkatan IMDI, dan menjadi acuan dalam perencanaan kebijakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital di Indonesia (Kominfo RI, 2024).

Gambar 1.1 adalah kategori skor IMDI, yang dikategorikan menjadi lima kategori tingkat digitalisasi antar wilayah. Kategorisasi ini memungkinkan untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat digitalisasi tinggi, cukup dan rendah, sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas intervensi untuk meningkatkan digitalisasi masyarakat. Kriteria kategorisasi IMDI ditentukan berdasarkan rata-rata dan standar deviasi dari nilai IMDI seluruh wilayah Indonesia selama periode 2022-2024.



Gambar 1. 1 Kategori Skor IMDI  
Sumber: Kemenkominfo, 2024

Kategori sangat rendah memiliki skor di bawah 30.88, menunjukkan bahwa masyarakat belum banyak menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kategori rendah dengan skor 30.88 hingga 36.27, menunjukkan bahwa tingkat penggunaan teknologi digital masih terbatas, masih fokus pada penggunaan dasar seperti media sosial. Kategori cukup dengan skor 36.28 hingga 47.06, bahwa penggunaan teknologi digital sudah mulai meningkat, namun masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut dalam berbagai aspek hidup. Kategori tinggi dengan skor 47.07 hingga 52.47, masyarakat sudah cukup mahir dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Terakhir dalam kategori sangat tinggi dengan skor di atas 52.47,

masyarakat sudah sangat terbiasa dengan teknologi digital dan mampu menggunakan secara efektif dan kreatif dalam berbagai bidang (Suwarno, 2024).

Pengukuran skor IMDI tidak hanya dilakukan secara nasional antar provinsi, tetapi juga dilakukan antar wilayah kota/kabupaten di Indonesia. Tabel 1.1 adalah skor pengukuran pada 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Tabel 1. 1 Skor Pengukuran IMDI Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
Tanggamus	35.51	44.37	46.49
<b>Pesawaran</b>	<b>31.83</b>	<b>44.71</b>	<b>45.82</b>
Metro	36.85	46.17	45.67
Mesuji	38.97	44.35	45.67
Lampung Utara	29.30	41.20	44.92
Bandar Lampung	34.88	45.79	43.86
Lampung Tengah	26.89	42.83	42.98
Tulang Bawang Barat	30.66	44.54	42.46
Way Kanan	34.52	43.48	42.25
Tulang Bawang	33.73	46.66	40.80
Lampung Selatan	38.41	45.02	40.64
Lampung Barat	37.32	45.85	39.07
Pringsewu	34.05	43.25	37.87
Pesisir Barat	29.80	41.17	37.04
Lampung Timur	28.53	39.83	35.86

Sumber: diolah oleh peneliti dari Kominfo (2024)

Berdasarkan tabel 1.1, pengukuran IMDI atas empat pilar di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa skor IMDI mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa lima besar kabupaten/kota yang memiliki skor IMDI tertinggi adalah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Pesawaran dengan pencapaian skor 45.82 pada tahun 2024, bermakna bahwa kabupaten tersebut telah memiliki tingkat kompetensi dan keterampilan digital yang cukup tinggi di Provinsi Lampung

Pada sektor pembangunan masyarakat digital, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Pesawaran memiliki fungsi sebagai pembina dan pelaksana komunikasi, desiminasi informasi serta hubungan masyarakat yang sangat berpengaruh bagi peningkatan pengguna teknologi (Kemkominfo, 2024). Berdasarkan pencapaian skor IMDI Kabupaten Pesawaran, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai peran Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan kemampuan digitalisasi masyarakat di daerah.

Penelitian mengenai peran pemerintah telah banyak dilakukan. Oleh sebab itu, penulis menguraikan lima penelitian sebelumnya, sebagai pertimbangan penulis dalam menentukan teori dan metode penelitian yang tepat bagi konteks peran Diskominfo Kabupaten Pesawaran pada pembangunan masyarakat digital di Kabupaten Pesawaran. Penelitian terdahulu terkait peran pemerintah adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama dengan judul “Peran Dinkominfo Kota Surabaya Dalam Menggalakkan Literasi Digital Menuju Pemanjapan Smart City” yang disusun oleh Pastheo, dkk (2024). Penelitian tersebut menjelaskan upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam mendukung konsep *smartcity* dengan meningkatkan *literacy digital*. Penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif tersebut menggunakan teori model analisis SOAR (*strengths, opportunities, aspirations, results*). Hasil penelitian, menunjukkan bahwa strategi dalam upaya peningkatan literasi digital masyarakat dilakukan dengan melakukan pendekatan untuk mencapai kondisi yang diinginkan, menggunakan keunggulan untuk mencapai hasil perencanaan strategis, melakukan pengoptimalah peluang untuk mencapai aspirasi atau kondisi, dan memanfaatkan peluang untuk mencapai hasil yang dapat diukur. Semua strategi tersebut diterapkan efektif untuk mendukung konsep *smartcity* di Kota Surabaya.

Penelitian kedua berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Teknologi Informasi di Daerah Terpencil” yang disusun oleh Khalil dan Syah (2024). Membahas upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas Teknologi Informasi (TI) di daerah terpencil serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan aksesibilitas TI di daerah terpencil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas TI di daerah terpencil dengan membangun infrastruktur jaringan, mensubsidi biaya layanan TI, mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian TI, memberikan edukasi dan literasi TI kepada masyarakat di daerah terpencil.

Penelitian ketiga dengan judul “Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Fasilitas Wisata Pada Puncak Pelangkah Gading di Kabupaten Karo” disusun oleh Arista (2023). Penelitian ini ditulis dengan tujuan ingin mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Puncak Pelangkah Gading di Kabupaten Karo. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan sumber data diambil menggunakan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu, peran pemerintah sebagai dinamisor dan fasilitator pada pengembangan fasilitas wisata pada Puncak Pelangkah Gading di Kabupaten Karo sudah optimal, sedangkan pada peran pemerintah sebagai regulator dan katalisator pada pengembangan fasilitas wisata pada Puncak Pelangkah Gading di Kabupaten Karo masih belum optimal.

Penelitian keempat berjudul “The Role and Role of Digital Government in Improving Government Transparency and Citizen Engagement” oleh Jiaqi Cao pada tahun 2023. Penelitian ini membahas mengenai faktor yang mempengaruhi dimensi tata kelola digital dan peran serta fungsi dalam transparansi pemerintah dan partisipasi warga negara melalui pemodelan persamaan dan analisis regresi.

Penelitian dengan menggunakan teori tata kelola digital yang mengacu pada tata kelola dan manajemen ini, bertujuan mendorong pembangunan sosial dan meningkatkan efektivitas tata kelola. Penelitian ini menggunakan analisis *regresi linier* berganda, yang memberikan penjelasan mendalam mengenai fenomena sosial dan alam yang kompleks dengan memanfaatkan analisis ini. Hasil penelitian ini menunjukkan transparansi pemerintah dan partisipasi warga negara memiliki efek positif pada tata kelola digital.

Terakhir penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Terhadap Dampak Pembangunan Pembangkit Tenaga Uap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue” oleh Saufiah dkk (2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa terhadap dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lero Tatari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori yang dikemukakan oleh (Labolo, 2006) yaitu peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Hasil penelitian ini yaitu peran pemerintah desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat belum optimal.

Penelitian sebelumnya yang telah diuraikan penulis, menunjukkan bahwa peran pemerintah membutuhkan strategi yang beragam dalam pencapaian tujuan program atau kebijakan. Oleh sebab itu, peneliti memiliki ketertarikan yang sama dengan penelitian sebelumnya, untuk melakukan penelitian mengenai peran pemerintah dalam pencapaian tujuan program.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu yang sudah ada, penelitian ini akan berfokus pada peran Diskominfo Kabupaten Pesawaran dalam upaya peningkatan empat pilar IMDI. Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Muhadam Labolo dalam buku berjudul “Memahami Ilmu Pemerintah Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangan” tahun 2006.

Buku ini sesuai dengan kategorisasi pilar peningkatan IMDI yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam upaya kemajuan teknologi oleh pemerintah, yaitu peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Ketiga peran tersebut merupakan satu hal yang saling terhubung dalam menciptakan masyarakat yang saling melengkapi secara digital dalam memanfaatkan teknologi sehingga mampu bersaing dengan dunia global yang semakin tergantung pada digitalisasi. Peningkatan IMDI sangat bergantung kepada seberapa baik pemerintah menjalankan peran tersebut dan bagaimana masyarakat dapat menerima kebijakan pemerintah tersebut. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator agar lebih optimal, yang akan lebih mudah dijelaskan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini membahas bagaimana peran Diskominfo Kabupaten Pesawaran dalam upaya peningkatan IMDI.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan IMDI di Kabupaten Pesawaran, maka peneliti membuat rincian pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam peningkatan IMDI?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam peningkatan IMDI.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian yang dibuat diharapkan memperluas wawasan dan menambah khasanah ilmu pemerintahan khususnya teori dalam peran pemerintah.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat luas dalam mengetahui peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran dengan memberikan informasi terkait IMDI.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Peran

Peran menurut terminologi merupakan seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran di definisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam organisasi (Meutha, 2019). Peran pemerintah sering kali dijalankan melalui pendekatan yang terencana, hal ini dilakukan untuk memajukan perubahan menuju kondisi yang lebih baru. Pemerintah dalam hal ini memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan yang akan diterapkan dalam penerapannya di masyarakat. Peranan disimpulkan condong pada fungsi, penyesuaian dan sebagai suatu proses. Peran timbul karena seseorang menyadari dirinya tidak mungkin untuk melakukan segala hal sendiri.

Pemerintah melakukan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan yaitu mengarahkan kepada pihak yang *relevan* (Labolo, 2006). Perlu adanya peran pemerintah secara optimal untuk membangun masyarakat. Peran pemerintah dalam upaya peningkatan optimalisasi peran dapat diukur dengan bagaimana pemerintah menjalankan perannya. Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan teori peran oleh Labolo (2006), pemerintah memerlukan peran yang optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, peran tersebut diantaranya peran pemerintah sebagai regulator yang memiliki peran dalam memberi acuan dasar untuk mengatur kegiatan membangun masyarakat secara optimal. Kemudian peran pemerintah sebagai fasilitator yang memberikan suasana kondusif dalam

melaksanakan pembangunan daerah. Serta peran pemerintah sebagai dinamisor sebagai penggerak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membangun masyarakat secara optimal (Jamal, 2023). Peran pemerintah tersebut secara mendalam dijelaskan, diantaranya sebagai berikut:

### **2.1.1. Peran Sebagai Regulator**

Pemerintah sebagai regulator menginterpretasikan bahwa membuat garis besar untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan merupakan tugas regulator. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai alat untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan (Labolo, 2006). Peran pemerintah sebagai regulator menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan seperti menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi pembangunan. Menurut Raintung (2021) peran pemerintah sebagai regulator menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan yaitu dengan menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi pemerintahan.

Sebagai regulator pemerintah daerah membuat aturan dan program tentang pemberdayaan masyarakat digital, memberikan acuan dasar yang kemudian dapat diterjemahkan oleh masyarakat sebagai *instrument* untuk dapat mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat digital. Peran pemerintah yang paling nampak yaitu bidang pembuatan kebijakan yang mempengaruhi secara keseluruhan (Raintung, 2021). Melalui regulasi pemerintah, peran pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam bidang pembuatan kebijakan yang mempengaruhi secara keseluruhan melalui regulasi pemerintah, pada aspek masyarakat digital.

Pemerintah sebagai regulator dapat diartikan sebagai pemberi acuan dasar yang ditunjukkan kepada masyarakat sebagai arahan yang menyangkut kegiatan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Proses tersebut dilakukan agar pengembangan dan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat agar lebih baik. Dalam hal ini aturan yang diciptakan pemerintah merupakan sebuah patokan yang dibuat untuk memberikan batasan-batasan masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya, sehingga aturan yang diciptakan pemerintah baik berupa kebijakan atau aturan lainnya diciptakan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum (Subhan, 2023).

Kaitannya hal tersebut dengan peningkatan indeks masyarakat digital Indonesia (IMDI) yaitu pemerintah berperan membuat regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan digitalisasi masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator dalam meningkatkan IMDI dengan fokus pada pengembangan pilar infrastruktur dan ekosistem; pilar keterampilan digital; pilar pemberdayaan; serta pilar pekerjaan. Sebagai regulator, pemerintah dapat menempatkan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur teknologi yang merata pada seluruh daerah Kabupaten Pesawaran, menciptakan ekosistem digital inklusif, serta memastikan akses masyarakat terhadap pelatihan keterampilan digital. Selain itu, kebijakan yang memfasilitasi penciptaan lapangan kerja baru dalam sektor digital akan mempercepat transformasi digital di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, peran sebagai regulator dapat di kategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Matrik Teori Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Dimensi	Aspek yang Dilihat
Dimensi Regulator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan peraturan tentang pelaksanaan pemberdayaan</li> <li>2. Peraturan untuk efektifitas dan tata tertib administrasi pembangunan</li> <li>3. Regulator pembangunan infrastruktur teknologi</li> <li>4. Penciptaan lapangan kerja baru dalam sektor digital</li> </ol>

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

### 2.1.2. Peran Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah memberikan bimbingan, pengarahan, mampu mengajak masyarakat agar terciptanya keperluan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan (Raintung, 2021). Pemerintah sebagai dinamisator menggerakkan partisipasi multipihak yang terjadi dalam pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah) (Sahid & Masse, 2023). Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara langsung dan efektif kepada masyarakat. Pemberian bimbingan tersebut bertujuan mewujudkan kelompok penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Menurut Jamal (2023) pemerintah memiliki peran aktif dalam mendorong percepatan transformasi digital di seluruh Indonesia dalam upaya peningkatan IMDI. Pemerintah dapat menginisiasi kebijakan dan program yang mendorong inovasi agar masyarakat dapat dengan cepat menerima digitalisasi. Dengan cara ini, pemerintah ingin mempercepat pembangunan infrastuktur digital yang merata, tetapi juga menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan digital dan berpartisipasi

dalam ekonomi digital yang terus berkembang, sehingga membuka lebih banyak peluang dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peran sebagai dinamisator dapat di kategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Matrik Teori Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Dimensi	Aspek yang Dilihat
Dimensi Dinamisator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong percepatan transformasi digital masyarakat</li> <li>2. Mendorong inovasi masyarakat agar dapat menerima digitalisasi</li> <li>3. Mempercepat pembangunan infrastruktur digital masyarakat</li> </ol>

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

### 2.1.3. Peran Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator menurut Sahid & Masse (2023) yaitu menciptakan kondisi kondusif bagi pelaksana pembangunan untuk menyalurkan berbagai kepentingan dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Peran pemerintah sebagai fasilitator sangat penting dalam menunjang kegiatan pembangunan yang ada di suatu wilayah, fasilitator bukan hanya berfokus pada pemberian sarana tapi juga memperhatikan prasarana yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat (Raintung, 2021).

Pemerintah sebagai fasilitator bergerak pada bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat. Peran pemerintah sebagai fasilitator sangat penting dalam menunjang kegiatan

pembangunan, fasilitas bukan hanya berfokus pada pemberian sarana tapi juga prasarana, dan juga pemerintah harus bisa memberikan bimbingan kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar dapat membangun sarana dan prasarana. Pemerintah membantu memaksimalkan pembangunan daerah dengan memenuhi berbagai kepentingan. Dibidang pendamping, pemerintah membantu melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Pemerintah daerah dalam upayanya sebagai fasilitator dalam mendukung peningkatan IMDI melakukan pengembangan pilar infrastruktur dan ekosistem, peningkatan keterampilan digital, serta pemberdayaan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Pemerintah dapat menyediakan berbagai fasilitas untuk mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam membangun infrastruktur teknologi, memberikan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan digital, serta memfasilitasi inisiatif pemberdayaan ekonomi digital yang membuka peluang kerja baru diberbagai sektor.

Dalam melaksanakan optimalisasi pembangunan, peran pemerintah dituntut untuk mampu bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu yang menjadi ciri peran pemerintah yang kuat adalah dengan melihat seberapa besar fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Apakah pelaksanaan pembangunan tersebut bersifat positif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan derajat otonom yang tinggi tanpa adanya *intervensi* dari kelompok kepentingan manapun. Berdasarkan hal tersebut, peran sebagai fasilitator dapat di kategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Matrik Teori Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

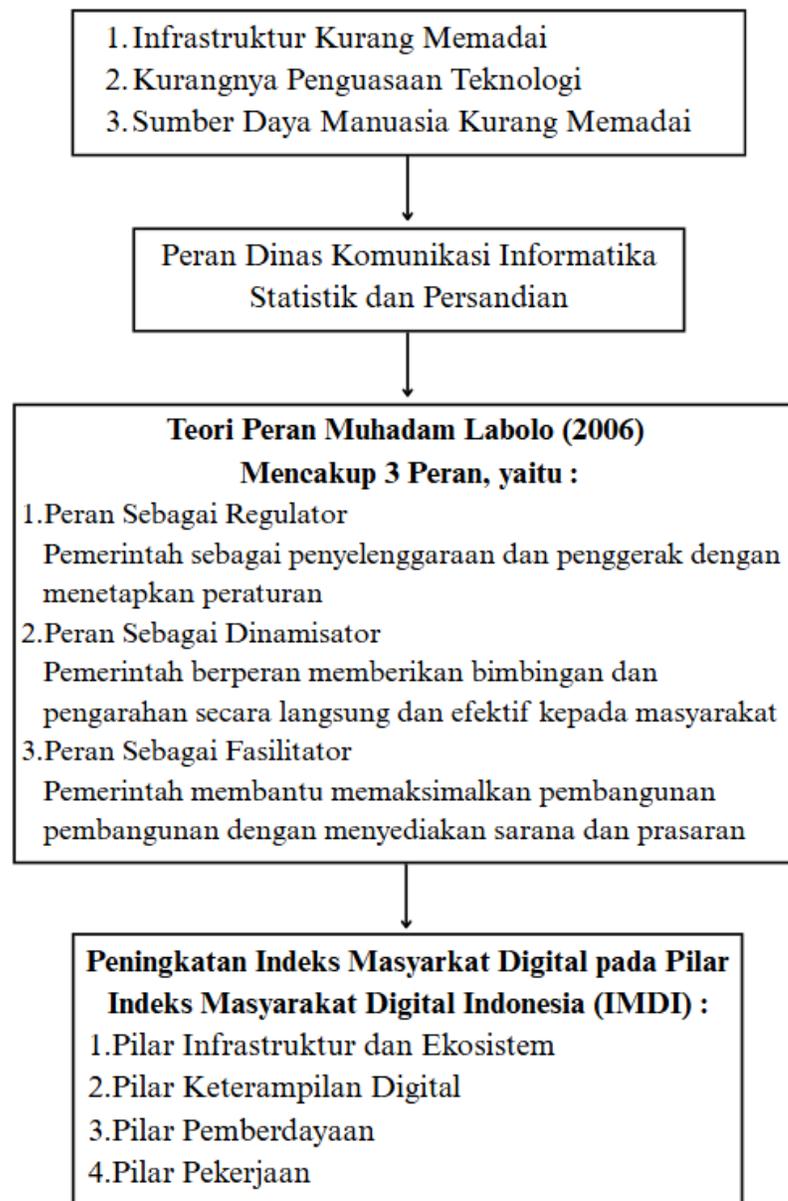
Dimensi	Aspek yang Dilihat
Dimensi Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana pembangunan</li> <li>2. Pemberian pendampingan melalui pelatihan</li> <li>3. Penyedia berbagai pendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta</li> </ol>

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

## 2.2. Kerangka Pikir

Menurut Syahputri (2023) kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang digabungkan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Kerangka berpikir dapat disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta keterkaitan antar variabel-variabel yang diteliti, yang biasa disebut dengan paradigma atau model penelitian. Kerangka berpikir dibuat untuk mempermudah suatu penelitian dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas.

Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Penyusunannya dapat menghasilkan kesimpulan yang di pertanggung jawabkan. Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang dibahas.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir  
Sumber: diolah oleh peneliti, 2024

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran tentang bagaimana Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Pesawaran berperan dalam peningkatan indeks masyarakat digital Indonesia (IMDI). Creswel dalam Arianto (2020) menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan berdasarkan *perspektif-konstruktif* atau *perspektif-partisipatori*, ataupun keduanya. Hal tersebut menegaskan bahwa penelitian kualitatif, dibangun peneliti melalui integrasi dengan mengacu perspektif dan informasi apa adanya dari subjek penelitian. Untuk mendukung interpretasi tersebut, berbagai sumber data termasuk sejarah, pengalaman dan wawancara digunakan.

Panjaitan (2017) menjelaskan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan pancaindra (deskriptif) tentang situasi atau peristiwa. Penelitian deskriptif diartikan sebagai akumulasi dasar dalam cara deskriptif untuk tujuan menemukan hal-hal yang mencakup metode deskriptif. Data kualitatif biasanya dijelaskan dalam bentuk kalimat serta uraian bahkan dapat berupa cerita pendek. Data kualitatif bersifat subjektif, karenanya peneliti yang menggunakan data kualitatif harus berusaha untuk dapat menghindari sikap subjektif yang dapat mengaburkan objektivitas data penelitian.

Penggunaan pendekatan kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai peran Diskominfo Kabupaten Pesawaran dalam upaya peningkatan IMDI, dengan penelitian ini peneliti dapat melakukan pendekatan yang secara intens dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat. Selain itu, pada penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti mengenai peran Diskominfo Kabupaten Pesawaran dalam upaya peningkatan IMDI karena penelitian ini tidak menggeneralisasi melainkan hanya menggambarkan fenomena dan bukan mencari sebab akibat dari suatu fenomena.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan sebuah batasan dari permasalahan pada penelitian kualitatif yang berdasarkan tingkat kepentingan, tingkat kelayakan permasalahan yang akan dipecahkan, faktor keterbatasan tenaga, dan dana serta waktu. Fokus penelitian memiliki peranan yang penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan dalam penelitian agar tidak terjebak luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2018). Fokus penelitian diartikan sebagai penentu konsentrasi sebagai suatu pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau analisis sehingga penelitian benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penelitian ini memfokuskan penelitian pada peran dinas dalam meningkatkan IMDI di Kabupaten Pesawaran. Peran yang dimaksud berdasarkan teori menurut (Labolo, 2006) yaitu peran dinas sebagai regulator dimana dinas menentukan kebijakan dan pengarahan kepada masyarakat untuk pengembangan masyarakat digital, peran dinas sebagai dinamisator untuk memberikan bimbingan dan pengarah, dan peran dinas sebagai fasilitator untuk memaksimalkan pembangunan daerah.

### 3.3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan fokus dalam penelitian, lokasi penelitian bertempat pada daerah Kabupaten Pesawaran. Lokasi ini dipilih karena belum adanya penelitian serupa mengenai IMDI mengingat perhitungan skor tersebut masih baru digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia (RI) dalam menghitung angka IMDI. Selain itu telah dilakukan pencarian informasi secara tidak langsung menggunakan *instrument* studi kepustakaan sehingga peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut. Pertimbangan pemilihan lokasi ini yaitu wilayah Kabupaten Pesawaran yang memiliki skor IMDI yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga memungkinkan untuk memilih lokasi tersebut.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang dilakukan paling utama dalam penelitian, karena tujuan penelitian tersebut adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2018), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah pembuktian, sebab tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan. Menurut Afizal (2015) dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang tertulis maupun diucapkan serta tindakan yang dilakukan oleh individu tanpa adanya upaya untuk mengemukakan data yang diperoleh kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mencari informasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus di teliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal dari narasumber yang lebih mendalam dan jumlah narasumber sedikit atau kecil. Dilakukan wawancara bertujuan untuk mengkontruksi perihal orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian, merekontruksikan harapan pada masa yang akan datang.

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data, melakukan studi mendalam agar menemukan permasalahan yang diteliti, tetapi apabila peneliti mengetahui hal dari narasumber yang lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara mengenai informan yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari Diskominfo Kabupaten Pesawaran yang akan di teliti mengenai suatu masalah khusus. Penelitian akan dilaksanakan menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu menggunakan pedoman wawancara secara sistematis. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pertanyaan wawancara memuat pertanyaan secara garis besar. Pengumpulan data menyiapkan *instrument* penelitian pertanyaan-pertanyaan tertulis dimana alternatif jawaban telah disiapkan.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan dengan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Penentuan sampel yang digunakan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan suatu teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki jabatan di Diskominfo Kabupaten Pesawaran yang memahami secara jelas mengenai peran pemerintah dalam upaya peningkatan IMDI serta masyarakat

yang sudah merasakan manfaat dari peningkatan teknologi digital di Kabupaten Pesawaran, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
Karyadi	Kepala Bidang Informasi dan Statistik	Membantu kepala dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyampaian informasi, serta pengumpulan dan analisis data statistik.
Ihsan Taufiq	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Membantu kepala dinas dalam merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan informasi publik.
Gunadhi Lilik S	Kepala Bidang Infrastruktur Telematika dan Persandian	Membantu kepala dinas dalam merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan infrastruktur telematika dan persandian.
Retno Safitri	Pranata Humas	Memiliki jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pelayanan informasi dan kehumasan

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025.

## 2. Dokumentasi

Dalam Sugiyono (2018) menjelaskan dokumentasi dalam arti luas adalah berkaitan dengan kegiatan menghimpun, mengolah, menyeleksi, dan menganalisis kemudian mengevaluasi seluruh data informan dan dokumen tentang kegiatan, peristiwa atau pekerjaan yang di publikasikan baik melalui media elektronik maupun media cetak dan kemudian disimpan secara teratur dan sistematis. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Teknik mengkaji dokumen dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencatat apa yang tertulis dalam dokumen atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang

sedang diteliti, kemudian berusaha untuk memahami makna. Dokumen tersebut dapat berupa buku dan *literature* yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mencari data.

Tabel 3. 2 Dokumen Penelitian

Dokumen	Keterangan
Rancangan Strategis Kominfo	Dokumen perencanaan yang disusun oleh Kemenkominfo untuk periode 5 tahun. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kerja, dan kerangka pendanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan Kemenkominfo.
Struktur Organisasi Kominfo	Dalam dokumen ini terdiri dari beberapa unit pelaksana, seperti Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang, dan unit kerja dibawahnya.
Peraturan Bupati Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kominfo	Berisi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas di tingkat daerah.
Jumlah Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) Kabupaten Pesawaran 2024	Laporan atau catatan perencanaan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) adalah dokumen yang berisi informasi tentang jumlah BTS yang dibutuhkan untuk melayani suatu wilayah, termasuk perhitungan kebutuhan berdasarkan populasi, luas wilayah, dan tingkat penetrasi seluler.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023	Peraturan ini membahas tentang Percepatan Tranformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Peraturan ini mengatur mengenai Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembayaran digital ( <i>digital payment</i> ).
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022	Peraturan ini membahas tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

### 3.5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data dapat melakukan pencarian data kembali ke lapangan yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Menurut Pasaribu (2023) mengatakan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau mengkategorikan data berdasarkan fokus penelitian. Pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan data dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Pada penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengolahan data yang digunakan peneliti dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Editing*

*Editing* dapat diartikan sebagai meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber.

2. Klasifikasi

Pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian. Seluruh data yang di dapat kemudian dibaca dan di telaah secara mendalam kemudian digolongkan kesuatu kebutuhan. Kebutuhan data-data tersebut dipilih dalam bagian yang memiliki persamaan data yang diperoleh pada wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

### 3. Verifikasi

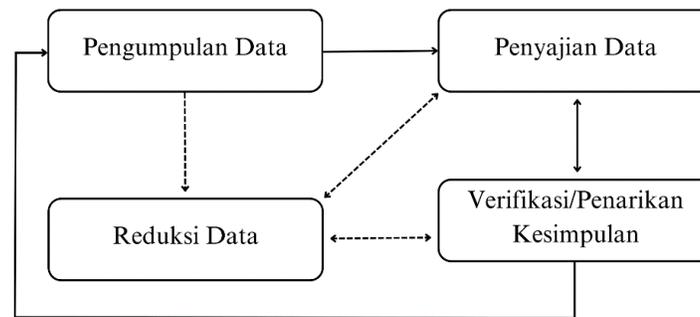
Proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subjek penelitian.

### 4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya yaitu *editing*, klasifikasi, dan verifikasi.

## 3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Afizal (2015) upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting sesuai apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Penelitian kualitatif akan melibatkan data verbal yang banyak dan harus di traskripikan. Huberman (2014) dalam penggunaan teknik analisis data berdasarkan hal berikut:



Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data  
Sumber: diolah oleh peneliti, 2024

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tindakan memilih dan memilah data yang sesuai dengan objek penelitian merangkum, memilah data-data pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola serta membuang hal yang dianggap tidak perlu.

### 2. Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian singkat dengan menjelaskan hubungan masing-masing kategori dan melampirkan dalam sebuah bagan.

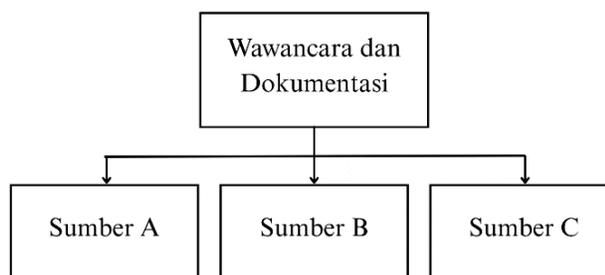
### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang ditemukan masih bersifat sementara sampai ditemukan data dan bukti yang lebih valid untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Proses penelitian kualitatif akan melibatkan data verbal yang banyak dan harus diterjemahkan.

### 3.7. Teknik Validasi Data

Ukuran kualitas sebuah penelitian terletak pada validitas data yang di kumpulkan selama penelitian tersebut terlaksana. Validasi data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknis triangulasi. Menurut Sugiyono (2018) peneliti yang melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Menurut (Alfansyur & Mariyani, 2020) metode triangulasi merupakan salah satu metode yang dicoba untuk menguji suatu informasi dikatakan valid atau tidak terhadap informasi yang diperoleh oleh riset. Triangulasi dapat dimaknai sebagai sebuah usaha pengecekan data dari berbagai macam sumber dengan beragam cara dan beragam waktu.

Triangulasi dalam penelitian dapat ditunjukan sebagai penguji agar data yang di periksa dapat di cek dari berbagai sumber data dengan cara beragam, dan waktu yang berbeda (Alfansyur & Mariyani, 2020). Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber. Penulis membandingkan hasil dari dokumentasi yang penulis amati dengan analisis data yang penulis lakukan.



Gambar 3. 2 Triangulasi Sumber  
Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

Triangulasi sumber dapat memperdalam informasi yang diperoleh selama penelitian melalui beberapa sumber atau informan. Melalui teknik ini, penulis berusaha membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari setiap sumber atau

informan sebagai bentuk perbandingan untuk mencari dan menggali kebenaran informan yang telah didapatkan. Dengan kata lain, triangulasi sumber dapat di artikan sebagai *cross check* data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber lainnya.

## IV. GAMBARAN UMUM

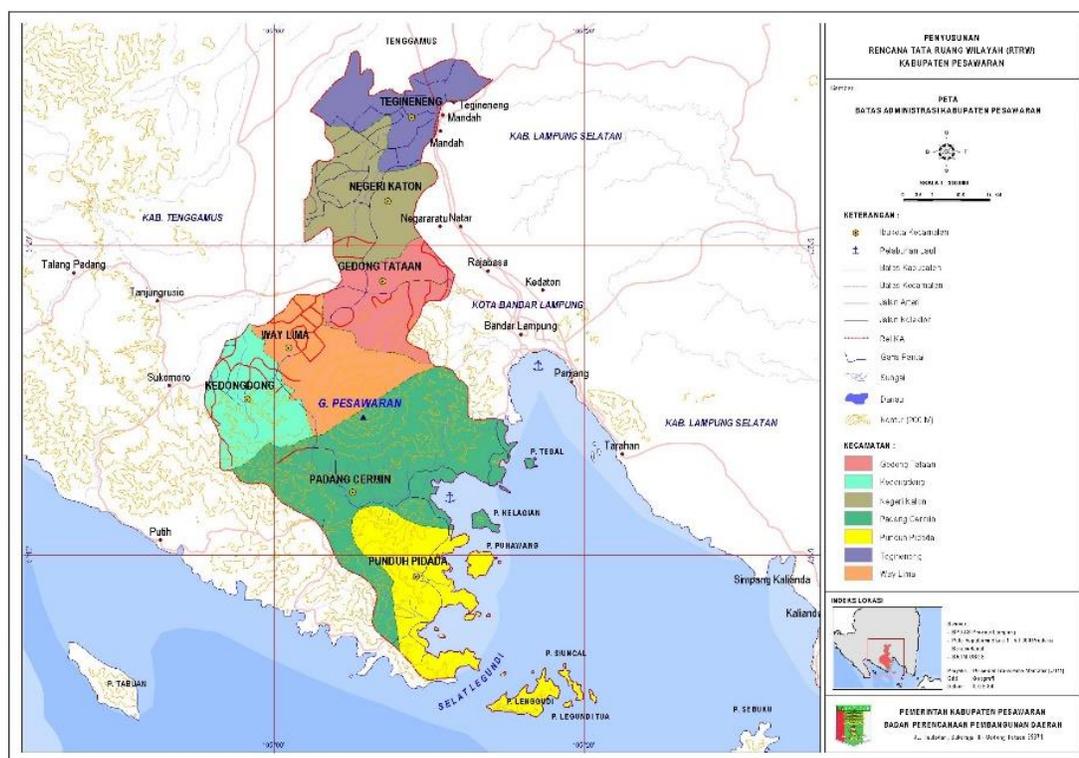
### 4.1. Sejarah Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten Pesawaran awalnya menyatu dengan Kabupaten Lampung Selatan namun setelah adanya pemekaran akhirnya kabupaten ini berdiri sendiri. Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dan diresmikan menjadi kabupaten pada tanggal 2 November 2007 yang sebelumnya masuk dalam Kabupaten Lampung Selatan.

Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat  $5,12^{\circ}$  –  $5,84^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $104,92^{\circ}$  –  $105,34^{\circ}$  Bujur Timur. Sedangkan secara administrasi Kabupaten Pesawaran memiliki luas wilayah 117.377 hektar atau 1.173,77 km<sup>2</sup> dengan Kecamatan Negeri Katon sebagai kecamatan terluas. Kabupaten Pesawaran memiliki jumlah kecamatan yang telah mengalami perubahan akibat adanya pemekaran dengan penambahan empat kecamatan sehingga total menjadi sebelas kecamatan, yaitu: Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Marga Punduh, Way Khilau, Way Ratai, dan Teluk Pandan. Berikut merupakan batas-batas administrasi Kabupaten Pesawaran, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Batas Utara : Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Trimurjo (Kabupaten Lampung Tengah)

- 2) Batas Selatan : Berbatasan dengan Teluk Lampung Kecamatan Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus
- 3) Batas Barat : Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Adiluwih (Kabupaten Pringsewu)
- 4) Batas Timur : Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan), Kecamatan Kemiling, Kecamatan Teluk Betung Barat (Kota Bandar Lampung).



Gambar 4. 1 Batas Administrasi Kabupaten Pesawaran  
Sumber: Website Bappeda Kabupaten Pesawaran 2024

#### **4.2. Gambaran Umum Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran**

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian yang di pimpin kepala dinas. Dinas ini bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Tugas utama Diskominfotiksan adalah menjalankan urusan pemerintah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian serta tugas pembantuan lainnya. Diskominfotiksan memiliki peran penting dalam beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengelola informasi dan komunikasi publik

Peran dinas disini sebagai penyusun kebijakan komunikasi publik pemerintahan daerah. Mengelola penyebaran informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, peran lainnya sebagai pengelola sosial media dan *platform* pemerintah daerah.

2. Mengembangkan dan mengelola teknologi informasi

Diskominfotiksan merencanakan dan menerapkan sistem *e-government*, mengelola infrastruktur dan mengembangkan aplikasi serta memberikan dukungan teknik informasi kepada instansi pemerintah lainnya.

3. Pengelolaan data statistik

Berperan sebagai pengumpul data statistik dari berbagai sektor daerah. Selain itu mengolah dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian menyajikan dan menyediakan data yang yang mudah dipahami untuk perencanaan pembangunan daerah.

#### 4. Keamanan informasi dan sistem persandian

Peran Diskominfo sebagai pengembang kebijakan dan prosedur keamanan informasi. Serta melakukan pengelolaan sistem persandian yang bertujuan melindungi informasi rahasia pemerintah.

#### 5. Pengembangan sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi Komunikasi

Peran Diskominfo sebagai penyelenggara pelatihan dan pengembangan kompetensi digital. Serta memberikan fasilitas sertifikat kompetensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi aparatur pemerintah daerah.

#### 6. Koordinasi dan kerjasama

Dalam hal ini Diskominfo berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan nasional dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

#### 7. Inovasi digital

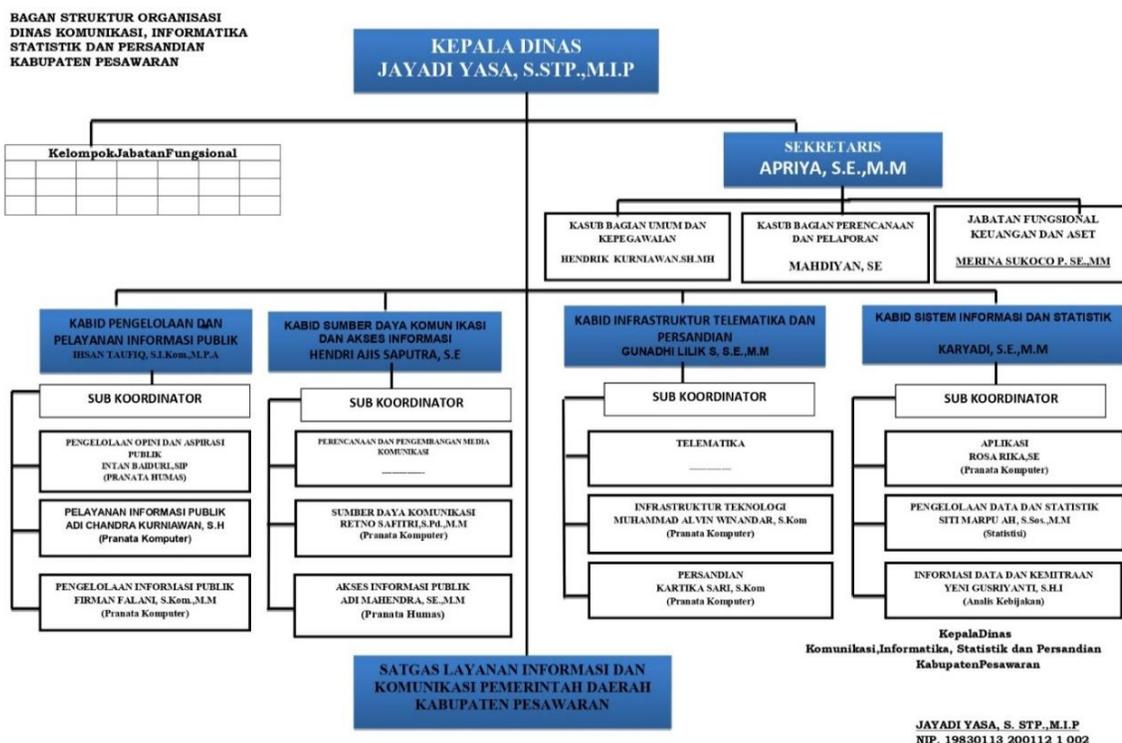
Diskominfo mendorong inovasi dalam pelayanan publik berbasis digital. Dengan demikian, pengembangan konsep lain dapat dilakukan sesuai konsep *smartcity* sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Diskominfo Kabupaten Pesawaran berlokasi di Jalan Raya Kedondong, Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pesawaran. Peraturan daerah ini lahir sebagai implementasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Diskominfo yang dipimpin oleh kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Diskominfo Kabupaten Pesawaran merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian di Kabupaten Pesawaran. Dinas ini didirikan pada tahun 2007 setelah pemekaran Kabupaten Pesawaran. Berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantu di bidang komunikasi, informatika dan bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah untuk membantu dalam menjalankan pemerintah daerah.

Diskominfo Kabupaten Pesawaran memiliki tugas yang harus dijalankan yaitu untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Statistik serta Persandian. Diskominfo Kabupaten Pesawaran memiliki peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, menyediakan informasi publik yang mudah diakses serta mengembangkan infrastruktur telematika dan persandian. Selain itu peran sebagai pengelola sistem informasi dan statistik yang efektif melalui koordinasi serta pelaksanaan evaluasi dan pemantauan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi menunjang efisien dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Susunan organisasi dan tata kerja Diskominfo Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Diskominfo Kabupaten Pesawaran. Struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Pesawaran, diantaranya sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi  
Sumber: Renstra DiskominfoTiksan Kabupaten Pesawaran, 2023

Berdasarkan gambar 4.2, penulis menjelaskan mengenai tugas dan fungsi yang diberikan kepada beberapa bidang yang menjankan peran masing-masing, diantaranya sebagai berikut:

#### 4.2.1. Kepala Dinas

Tugas pokok kepala dinas adalah memimpin dinas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dinas melakukan pembinaan terhadap aparatur dinas agar dapat melaksanakan tugas yang dapat berhasil guna melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika dengan instansi pemerintah dan orginasisasi lainnya sesuai ketentuan. Tugas kepala

Diskominfo Kabupaten Pesawaran yaitu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi, sumber daya komunikasi dan akses informasi, infrastruktur telematika dan persandian serta sistem informasi dan statistik;
- 2) Menyelenggarakan pengeorganisasian penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta menyelenggarakan pengorganisasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, sumber daya komunikasi dan akses informasi, infrastruktur telematika dan persandian serta sistem informasi dan statistik;
- 3) Menyelenggarakan pemantau, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan dan pelayanan informasi, sumber daya komunikasi dan akses informasi, sumber daya komunikasi dan akses informasi, infrastruktur telematika dan persandian serta sistem informasi dan statistik;
- 4) Menyelenggarakan administrasi Diskominfo;
- 5) Melaksanakan fungsi yang diberikan oleh Bupati Pesawaran sesuai ketentuan.

#### **4.2.2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang merupakan staf dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Diskominfo. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepala dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur lingkungan Diskominfo. Sekretariat mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembina, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi diantaranya merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Koordinasi kegiatan dinas;
- 2) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi dinas;
- 3) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 4) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- 6) Melaksanakan fungsi lain yang berikan oleh kepala dinas.

#### **4.2.3. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik**

Bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknik serta melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai fungsi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan kebijakan di bidang;

- a. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di pemerintah daerah
  - b. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah
  - c. Pelayanan informasi publik
  - d. Penyediaan dan pengelolaan konten lintas sektoral dan media komunikasi publik
- 2) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang yang sama;
  - 3) Memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang yang sama;
  - 4) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang yang sama;
  - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.

#### **4.2.4. Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Akses Informasi**

Bidang sumber daya komunikasi dan akses informasi bertugas menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan *e-government*. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Akses Informasi mempunyai fungsi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dalam penyusunan program kerja, anggaran, dan rencana kerja dinas;
- 2) Memimpin, mengarahkan, dan memantau pelaksanaan tugas sesuai program;
- 3) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik;
- 4) Mengawasi, membina dan mengendalikan kegiatan bidang tersebut;

- 5) Menjalinkan kerjasama dengan instansi terkait;
- 6) Menyiapkan telaahan hukum, rancangan daerah (PERDA), dan analisis peraturan;
- 7) Mempelajari peraturan terkait pelaksanaan tugas;
- 8) Membagi tugas kepada bawahan dan menerima laporan untuk penyusunan program kerja;
- 9) Memberikan motivasi dan bekerjasama dengan unit kerja lain;
- 10) Membuat laporan kepada kepala dinas dan melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan.

#### **4.2.5. Bidang Infrastruktur Telematika dan Persandian**

Bidang infrastruktur telematika dan persandian dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Tugas pokok bidang infrastruktur telematika dan persandian adalah menghimpun, mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknik serta melaksanakan kegiatan bidang. Pada bidang ini susunan organisasi bidang pengelolaan berbasis elektronik terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Bidang infrastruktur telematika dan persandian mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan infrastruktur telematika dan persandian. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Infrastruktur Telematika dan Persandian mempunyai fungsi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan kebijakan di bidang:
  - a. Infrastruktur dasar data *center*
  - b. Pengembangan intranet dan akses internet
  - c. Keamanan informasi *e-government*

- d. Sistem komunikasi intra-pemerintah
  - e. Penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO)
  - f. Pengembangan sumber daya infrastruktur TIK pemerintah daerah
- 2) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang yang sama;
  - 3) Memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang yang sama;
  - 4) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang yang sama;
  - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan;

#### 4.2.6. Bidang Informasi dan Statistik

Bidang sistem informasi dan statistik di Diskominfo dikendalikan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang sistem informasi dan statistik mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan sistem informasi dan statistik. Susunan organisasi bidang persandian dan statistik terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala bidang informasi dan statistik mempunyai fungsi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan kebijakan di bidang:
  - a. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi *generic*, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi
  - b. Nama domain dan sub-domain untuk lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan
  - c. Manajemen data, kemitraan, dan informasi *e-government*
  - d. Integrasi layanan publik dan pemerintahan

- e. Pengembangan sumber daya aplikasi dan layanan TIK pemerintah daerah
- 2) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang yang sama;
- 3) Memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang yang sama;
- 4) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang yang sama;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan;

### **4.3. Visi Misi dan Moto Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran**

#### **4.3.1. Visi**

Lebih maju dan sejahtera dengan masyarakat produktif. Maksud dari visi tersebut yaitu gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021 - 2026.

#### **4.3.2. Misi**

Dalam mendukung visi yang dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Pesawaran, berikut merupakan misi yang dibentuk dan akan dijalankan, diantaranya sebagai berikut:

- a) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan layanan publik yang berkualitas, akuntabel dan berkinerja tinggi
- b) Menyediakan sarana dan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkualitas yang berkeadilan dan merata

- c) Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul, berkarakter dan berdaya saing
- d) Meningkatkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal

#### **4.3.3. Motto**

Telekomunikasi adalah prioritas

#### **4.4. Peran Ideal Dinas Dalam Peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia**

Dalam buku yang di tulis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) (2024) yang membahas mengenai IMDI, bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia digital yang berkualitas, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti belum meratanya akses infrastruktur, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, serta ketidakseimbangan pasar tenaga kerja, baik dari sisi ketersediaan tenaga kerja maupun kebutuhan pasar. Untuk mewujudkan hal tersebut transformasi digital dengan masyarakat digital sebagai salah satu pilar utama, perlu dapat melihat kondisi masyarakat digital di Indonesia saat ini. Cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan pengukuran IMDI. Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan dan program pengembangan SDM digital yang tepat sasaran.

Pedoman dalam merumuskan kebijakan dalam upaya peningkatan IMDI dalam mewujudkan transformasi digital tidak hanya dilakukan oleh Kemenkominfo namun dapat dibentuk oleh pemerintah daerah dengan melihat kepentingan masing-masing daerah tersebut. Diskominfo Kabupaten Pesawaran dalam transformasi digital memiliki peran strategis untuk mewujudkan ekosistem digital yang berkelanjutan yang bertujuan mendukung peningkatan IMDI melalui penerapan kebijakan,

pemberdayaan, serta pemberian fasilitas yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kurniawan (2023) mengungkapkan bahwa keberhasilan transformasi digital di tingkat nasional sangat bergantung pada kapasitas dan kinerja institusi di tingkat kabupaten/kota dalam menerjemahkan kebijakan pusat menjadi program yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Dalam hal ini, peran ideal dapat dilihat tidak lagi sebatas penyedia regulasi atau kebijakan, tetapi juga berkembang menjadi pemberi arah atau pemberdayaan dan fasilitas kepada masyarakat agar dapat mewujudkan masyarakat digital yang berkelanjutan.

Peran ideal Diskominfo Kabupaten Pesawaran dalam upaya peningkatan IMDI dilakukan dengan menggabungkan kepentingan dinas sendiri dengan dinas lainnya yang saling berkaitan dengan keperluan kebijakan. Diskominfo Kabupaten Pesawaran berperan sebagai penghubung antara dinas-dinas lain dalam lingkup daerah Kabupaten Pesawaran, seperti Dinas Koperasi dan UMKM untuk fasilitas digital usaha mikro, Dinas Pariwisata untuk pengembangan destinasi digital dan pemasaran berbasis teknologi sehingga memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesawaran, dan juga pemerintah daerah lainnya.

## VI. PENUTUP

### 6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Pesawaran, dapat disimpulkan bahwa peran Diskominfo Kabupaten Pesawaran telah menjalankan peran strategis melalui tiga fungsi utama yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Peran sebagai Regulator

Dalam perannya sebagai regulator, Diskominfo Kabupaten Pesawaran telah menjalankan peran regulator dalam mendukung transformasi digital melalui empat pilar utama IMDI. Peran pemerintah sebagai regulator menjadi landasan untuk pengembangan infrastruktur digital, peningkatan keterampilan digital masyarakat, pemberdayaan, dan transformasi pekerjaan di era digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori peran pemerintah sebagai regulator tetap relevan dan dapat diterapkan dalam era transformasi digital, dengan adaptasi yang sesuai karakteristik teknologi dan kebutuhan masyarakat digital.

#### 2. Peran sebagai Dinamisator

Dalam menjalankan peran pemerintah sebagai dinamisator, Diskominfo Kabupaten Pesawaran secara aktif membuat perubahan digital dalam mendukung transformasi digital melalui empat pilar IMDI. Diskominfo Kabupaten

Pesawaran juga menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pelatihan digital melalui berbagai kegiatan seminar dan program literasi digital.

### 3. Peran sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, Diskominfo Kabupaten Pesawaran telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung digitalisasi. Ini meliputi pengembangan portal digital, pembangunan jaringan intranet dan internet, pengadaan server pusat data, serta pembentukan layanan digital bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Dinas menyediakan akses informasi publik berbasis digital melalui sebuah *website*, portal PPID, media sosial resmi, dan WhatsApp Center. Dalam bidang pekerjaan, dinas memfasilitasi program magang serta layanan bagi pelaku UMKM.

## 6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang sudah dikemukakan, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan Diskominfo Kabupaten Pesawaran dapat memperkuat regulasi mengenai pengembangan infrastruktur digital terutama di daerah *blankspot* untuk mewujudkan digitalisasi yang inklusif di Kabupaten Pesawaran.
2. Diharapkan Diskominfo Kabupaten Pesawaran dapat memperluas program-program pelatihan digital dengan jauh lebih kreatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pesawaran.
3. Diharapkan Diskominfo Kabupaten Pesawaran dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital terutama daerah yang masih terkena *blankspot* dengan menggunakan teknologi sesuai kondisi geografis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sahid, & Ambo Masse. (2023). Efektivitas Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata Di Taman Nasional Bantimurung Kabupaten Maros. *Journal of Administrative and Social Science*, 5(1), 121–130. <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.906>
- Afizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Cetakan Ke). PT Raja Grafinso Persada.
- Agus Wira Sukarta. (2025). *Telkomsel perluas jaringan di Desa Pulau Legundi gunakan teknologi Rural Star*. Antara Lampung.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Arianto, P. (2020). Modul Metode Penelitian. In Zarkoni (Ed.), *Metode penelitian* (Vol. 5, Issue July, p. 58). Komunikasi UII.
- Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243. <https://doi.org/04,48>
- Dannia Helin Amrina. (2023). *Mengenal SMESCO dan Cara Mendaftarkan Produk di Galerinya*. PT Indonesia Tumbuh Inklusif.
- Dinkominfo, P., Surabaya, K., Menggalakkan, D., Digital, L., & City, P. S. (2024). *Jurnal+Pastheo+Triwi*. 3(9), 1–8.
- Febriyanti, D., Widianingsih, I., Sumaryana, A., & Buchari, R. A. (2023). Information Communication Technology (ICT) on Palembang city government, Indonesia: Performance measurement for great digital governance. *Cogent Social Sciences*, 9(2).
- Huberman &, M. (2014). *Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles & Huberman*. MrcrabshopTrading.
- ICloud. (2022). *Usando um Internet Service Provider – ISP Para Conectar à Internet*. <https://www.icloud.com.br/281/usando-um-internet-service-provider>
- Indoneisa, K. U. R. (2025). *SMESCO*. Smesco.Go.Id. <https://smesco.go.id/>

- Indonesia, K. K. dan D. R. (2025). *Digitalent*. <https://digitalent.komdigi.go.id/#>
- Indonesia, P. P. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional*. 132281, 1–3.
- Informasi, R. T. (2024). *Kominfo taksan Pesawaran Sambut 22 Mahasiswa Progtam MSIB Batch 7*. TintaInformasi. <https://tintainformasi.com/2024/09/kominfo taksan-pesawaran-sambut-22-mahasiswa-program-msib-batch-7/>
- Jamal, J. (2023). Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Mewujudkan Program Open Defecation Free (Odf). *E-JKPP*, 9(1), 36. <https://doi.org/10.36448/ejkpp.v9i1.3122>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). Indeks Masyarakat Digital Indonesia. *Imdi.Sdmdigital.Id*. [https://imdi.sdmdigital.id/home\\_2023](https://imdi.sdmdigital.id/home_2023)
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. (2021). Panduan Singkat Magang dan Studi Independen Bersertifikat Untuk Mahasiswa. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 1–29.
- Khalil, K., & Syah, R. (2024). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Teknologi Informasi di Daerah Terpencil. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(6), 3448–3457. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.15410>
- Kominfo, B. (2024). *Indeks Masyarakat Digital Indonesia*. Puslitbang Aptika IKP. <https://imdi.sdmdigital.id/tentang-kami/tentang-pilar>
- Kota, S. P. (2024). *Peta Kabupaten Pesawaran*. <https://peta-kota.blogspot.com/2011/08/peta-kabupaten-pesawaran.html>
- Kurnia, N. D., Johan, R. C., & Rullyana, G. (2018). Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di Upt Perpustakaan Itenas. *EduLib*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.17509/edulib.v8i1.10208>
- Kurniawan, Z. (2023). *Transformasi Digital dalam G20*. V, 28–35.
- Labolo, D. M. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangan*. PT Raja Grafindo Persada. [http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show\\_detail&id=3477](http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=3477)
- Luis Fernandez Sanz. (2022). *Keterampilan Digital*. Karrier.Mu. <https://www.karier.mu/blog/umum/pentingnya-digital-skill-untuk-karier-masa-kini/>
- Meutha, A. (2019). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Perahu Pinisi di Kelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. In <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Natika, L. (2024). Transformasi Pelayanan Publik Di Era Digital: Menuju Pelayanan Masa Depan Yang Lebih Baik. *The World of Public Administration Journal*, 6(1),

1–11. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v6i1.2040>

- Operator PPID Lampung. (2021). *Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Lakukan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Pesawaran*. PPID.
- Panjaitan, R. (2017). Metodologi Penelitian. In Pertama (Ed.), *Jusuf Aryani Learning*.
- Pasaribu, D., Situmorang, C. V., Darmayanti, N., Triyani, Y., Heningtyas, O. S., Astuti, E. B., Syamil, A., Wardhana, A., Indriani, I. K., Syarif, S. M., Amru, M., Sulaksono, H., Rachmanu, E. D., Setiawan, G., Halawa, F., Sundari, A., & Silvera, D. L. (2023). Metodologi Penelitian Akuntansi Dan Manajemen Pendekatan Kuantitatif. In *Penerbit Media Sains Indonesia* (Issue 2).
- Pemerintah, Sipd. S. I. D. K. (2024). *Kegiatan Pembinaan Program Desa Cinta Statistik “Desa Cantik” Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran*. <https://hanura-telukpandan.metadesa.id/pages/articles/artikel.aspx?id=5573>
- Persandian, S. D. A. N., Yasa, J., Stp, S., Bagian, K., Dan, U., & Se, M. S. P. (2023). *KEPALA DINAS*. 19830113.
- Pesawaran, P. (2023). *Satu Data Pesawaran*. Satu Data Pesawaran. <https://data.pesawarankab.go.id/tentang>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEAENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Presiden, P., Indonesia, R., Indonesia, S. D., Tuhan, D. R., & Esa, M. (n.d.). *akurat, mutakhir, terpadu*, . 004185.
- Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2019a). *Bupati pesawaran*. 12.
- Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2019b). *Bupati pesawaran*.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1–9.
- Rino Subekti, S.Kom., M. K., Daniel Adolf Ohyver, S.E., M. P., Loso Judijanto, S.Si., M.M., M. S., Najirah Umah, S.Kom., M. ., Dr. Nur Hayati, S.ST., M. ., I Putu Susila Handika, S.Kom., M. ., Joosten, S.Kom., M. E., Miguna, S.Kom, M. K., Yoseb Boari, S.E., M. S., & Dr. Saktisyahputra, S.I.Kom., M. I. K. (2024). *Transformasi Digital (Teori & Implementasi Menuju Era Society 5.0)* (E. Rianty (ed.); Cetakan Pe). SONPEDIA.
- Saufiah, R., Hasbiyah, S., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2024). *Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa tabalong mati kecamatan amuntai utara kabupaten hulu sungai utara*. 1, 634–644.
- Subhan Ngolomasarani, BAKRI LA Suhu, rahmat S. (2023). Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Kira Kecamatan Galela

- Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Government Of Archipelago*, 5(2), 14–20.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabet.
- Sumselnews, R. (2021). *Bersama Kominfo Provinsi Lampung, Diskominfo Pesawaran Lakukan Pembinaan KIM*. Cyber Media SumselNews.
- Suwarno. (2024). *Analisis IMDI Indonesia dan Implikasinya untuk Pendidikan dalam Kerangka SDGs*.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Timoty Agustian Berutu, Dina Lorena Rea Sigalingging, Gaby Kasih Valentine Simanjuntak, & Friska Siburian. (2024). Pengaruh Teknologi Digital terhadap Perkembangan Bisnis Modern. *Neptunus: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 2(3), 358–370.
- Wang, C., Zhang, Y., Ding, H., Z. (2023). Applied Mathematics and Nonlinear Sciences. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 8(2), 3383–3392.